

PENGARUH ISLAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KESULTANAN TERNATE

Masfa Malan

Dosen IAIN Ternate

malanmasfa@gmail.com

Abstrak

Kesultanan Ternate merupakan salah satu wilayah dari empat kesultanan yang berada di *Moloku Kie Raha* dan bahkan Indonesia yang masih tetap eksis dengan model pemerintahannya yang khas, yakni memadukan antara sistem pemerintahan (kesultanan) dengan nilai-nilai agama (Islam). Perpaduan antara agama (Islam) dan tradisi lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan inilah yang kemudian mengantarkan kesultanan Ternate menjadi salah satu kerajaan besar yang disegani oleh kerajaan di Nusantara bahkan dunia. Dari sini ada ketertarikan penulis untuk melihat pengaruh nilai ke-Islaman dalam penyelenggaraan kesultanan Ternate, sehingga mampu mempertahankan eksistensinya hingga saat ini, dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Kesultanan Ternate adalah sebuah Kerajaan yang terlahir dari solidaritas rakyat yang dalam teori Ibnu Khaldun disebut dengan *Ashabiyah*. *Ashabiyah* dikalangan rakyat Ternate ini telah terbentuk jauh sebelum masa kesultanan yang dikenal dengan *momole*. Dan dari solidaritas tersebut kemudian berevolusi menjadi sebuah negara yang dilakukan dengan satu konsensus politik yang dikenal dengan konsensus *foramadiabi* yang kemudian melahirkan kerajaan Ternate. Ketika masuknya ajaran Islam ke Ternate dan mengalami akulturasi dengan kebudayaan Ternate, maka terjadi reformasi sistem pemerintahan yakni, perubahan gelar raja dari *Kolano* menjadi *Sultan* dan terdapat penambahan lembaga yang mengurus bidang keagamaan yang disebut dengan *Bobato Akbirat*. Selain itu, ada juga beberapa kebijakan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang bersumber dari ajaran Islam.

Kata Kunci: Pemerintahan, Islam, Kesultanan Ternate

A. Pendahuluan

Islam adalah agama universal yang kehadirannya tidak hanya mengatur persoalan teologi semata (hubungan antara hamba dengan Tuhan-nya). Akan tetapi

Islam juga merupakan agama yang mengatur interaksi sosial umat manusia, salah satunya adalah masalah politik kenegaraan.

Hal ini telah terbukti dalam sejarah umat manusia ketika Nabi Muhammad SAW membangun negara Islam di Madinah kemudian dilanjutkan oleh *khulafa al-rasydin* dan beberapa kerajaan Islam sesudahnya. Bahkan sejarah dunia juga mencatat bahwa negara Islam pernah menguasai belahan dunia dan menjadi satu peradaban besar di muka bumi.

Dalam catatan sejarah politik kenegaraan Islam, lebih banyak diwarnai oleh negara kerajaan (*monarchy state*). Meskipun awal kebangkitan politik kenegaraan Islam adalah negara khilafah, namun negara Islam yang bercorak khilafah hanya berlangsung dalam empat kepemimpinan¹ pasca Nabi Muhammad SAW. Setelah kepemimpinan keempat Khalifah tersebut, wajah perpolitikan Islam mengalami evolusi dari khilafah menjadi kerajaan.

Evolusi sistem politik kenegaraan tersebut jika dilihat secara umum, hanya terjadi dalam sistem dan struktur pemerintahan. Sistem pemerintahan diganti dengan sistem kerajaan dan struktur negara dipimpin oleh seorang raja yang kekuasaannya bersifat turun temurun. Namun, pengaruh nilai-nilai ke-Islaman dalam penyelenggaraan pemerintahannya tetap terbangun.

Ketika mencapai puncak kejayaannya, pengaruh Islam pun mulai meluas ke berbagai daerah di belahan dunia. Indonesia adalah salah satu wilayah yang mendapat pengaruh terkuat dari ajaran Islam. Kekuatan pengaruh Islam di Indonesia ini terlihat ketika hampir sebagian besar kerajaan di Nusantara menganut nilai-nilai ajaran Islam. Di antara kerajaan ini, terdapat satu kerajaan di wilayah timur Nusantara yang dikenal dengan kerajaan Ternate.

Kerajaan Ternate merupakan salah satu dari empat kerajaan Islam di Maluku Utara (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo) dan merupakan salah satu kerajaan Islam

¹Empat kepemimpinan pasca Nabi Muhammad SAW ini adalah Abubakar, Umar, Utsman dan Ali. Keempat pemimpin tersebut memimpin negara Islam yang masih bercorak khilafah, dimana negara didasarkan pada Syariat Islam dan pengangkatan satu kepemimpinan berdasarkan Bai'at dari ummat. Corak negara khilafah ini berawal pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan berakhir pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Tahlid. Jika dihitung tahun perjalanannya, masa negara khilafah hanya berumur kurang lebih 29 tahun (632-661 M/ 11-40 H).

tertua di Indonesia, yang didirikan oleh Baab Masyhur Malamo sekitar 761 tahun silam tepatnya pada tahun 1257 M, dan masih bertahan hingga saat ini.

Kesultanan Ternate memiliki peranan penting di kawasan timur Nusantara di antara abad ke 13-17 M dan sangat disegani oleh beberapa kerajaan yang berada di belahan timur Nusantara karena memiliki kekuatan politik dan militer. Pada masa kejayaannya, kesultanan Ternate berhasil memperluas wilayah kekuasaannya membentang dari wilayah Mindanao di utara sampai Bima di selatan, dari Makassar di barat hingga kepulauan Banda di timur.²

Tentu dalam membangun dan mempertahankan kekuasaannya, terdapat berbagai instrumen yang digunakan oleh Kesultanan Ternate, salah satunya adalah membangun satu sistem pemerintahan yang kuat. Dalam teori kekuasaan, Robert McIver mengartikannya sebagai kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan berbagai alat dan cara yang disediakan.³

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa “alat” sebagai media untuk membangun kekuasaan, dapat ditafsirkan berupa suatu sistem pemerintahan yang dibangun oleh setiap penguasa (negara) untuk menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan dalam rangka mempertahankan kekuasaannya.

Kesultanan Ternate sebagai satu bentuk kerajaan Islam, tentu mempunyai satu sistem penyelenggaraan pemerintahannya yang tidak terlepas dari nilai-nilai ke-Islaman. Keterikatan antara nilai-nilai Islam yang melembaga dalam sistem pemerintahan kesultanan Ternate ini terbangun sejak kesultanan Ternate di bawah kekuasaan Sultan Zainal Abidin.

Sultan Zainal Abidin adalah salah satu sultan Ternate yang terkenal memiliki pengetahuan keagamaan yang kuat. Sejak masa kecilnya, Zainal Abidin telah mendapat pengajaran yang intens tentang keagamaan (Islam) dan pernah juga mengenyam

² Fachri Ammari, J.W. Siokona, *Ternate Kelahiran dan Sejarah Sebuah Kota* (Pemerintah Kota Ternate, 2003) hlm. 66.

³ Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2010) hlm. 175

pendidikan agama Islam di Jawa yang diajarkan oleh Sunan Giri. Setelah kembalinya Zainal Abidin dari pendidikannya di Giri dan diangkat menjadi Sultan Ternate, Zainal Abidin kemudian melembagakan Islam kedalam penyelenggaraan pemerintahan kesultanan Ternate.

Dari latar belakang ini, ada satu hal yang menarik untuk dilihat adalah ketika Islam telah dilembagakan, maka tentu mempunyai pengaruh dalam pemerintahan. Oleh karena itu, ada satu pertanyaan yang muncul yakni bagaimana pengaruh Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan di kesultanan Ternate? Dari pertanyaan tersebut, maka dalam penulisan ini penulis ingin mendeskripsikan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan yang dibangun oleh Kesultanan Ternate, dengan menggunakan pendekatan sosial politik.

A. Kajian Teori

Berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian. Sajikan kajian teori dengan font minion pro ukuran 12pt.

Untuk lebih memahami tentang pengaruh Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kesultanan Ternate, maka perlu melihat basis teori yang menjadi landasan dari topik tersebut. Jika dilihat dari topik makalah ini maka ada dua teori yang menjadi kerangka penulisan, yakni teori tentang solidaritas sosial sebagai awal dari terbentuknya pemerintahan dan negara, serta teori tentang dinamika sosial yang lebih terfokus pada pengaruh satu kebudayaan terhadap budaya lainnya.

1. Solidaritas Sosial : Akar Terbentuknya Pemerintahan dan Negara

Berbicara tentang pemerintahan⁴ dan negara adalah dua konsep yang mempunyai perbedaan makna. Barangkali dapat dikatakan bahwa pemaknaan

⁴ Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan. Dari segi *dinamika*, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Dari segi *structural fungsional*, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional. Sedangkan dari segi *tugas dan kewenangan*, pemerintahan berarti seluruh tugas dan

negara lebih luas dari pada pemerintahan, karena pemerintahan merupakan salah satu dari unsur atau bagian negara. Akan tetapi pemerintahan dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena pemerintahan adalah satu sistem yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai cita-cita dari negara. Hubungan antara pemerintahan dan negara ini oleh Jean Jaques Rosseau mempunyai keterkaitan yang sangat erat.⁵ Dengan demikian, maka terbentuknya satu pemerintahan itu tidak terlepas dari terbentuknya negara itu sendiri.

Secara umum, negara (*state*) adalah satu organisasi yang dibentuk untuk mendorong terwujudnya sebuah cita-cita bersama, dimana didalamnya terdapat unsur wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan. Proses terbentuknya negara di kalangan pemikir politik Islam misalnya Ibnu Khaldun yang lebih melihat dari sudut pandang sosiologis tentang terbentuknya satu negara, ia menyatakan bahwa terbentuknya satu negara tidak terlepas dari diri manusia sebagai subjek dalam kehidupan itu sendiri. Manusia sebagai makhluk berpikir, makhluk politik, makhluk ekonomi, dan makhluk berperadaban tidak dapat melangsungkan kehidupannya tanpa berhubungan dengan manusia yang lain.

Sebagai makhluk yang saling membutuhkan, maka ada hal yang tidak bisa dihindari adalah ketika untuk memenuhi kebutuhan antara sesama manusia tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni, menggunakan “etika kemanusiaan” maupun “etika kebinatangan” baik secara individu (*individuality*) maupun kelompok (*community*). Oleh karena itu, untuk dapat membangun kelangsungan hidup yang manusiawi, maka dibutuhkan satu wadah (organisasi) untuk mengatur hubungan ketergantungan tersebut.

Terbentuknya organisasi atau wadah perkumpulan ini juga oleh Ibnu Taimiyah menjadi satu keharusan. Hal ini sebagaimana pendapatnya yang dikutip Khalid Ibrahim Jindan :

kewenangan negara. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit PT Grafindo, 2010) hlm. 215

⁵ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. III, 2007) hlm. 254

“Tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahteraan sempurna, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali jika ia tergabung dalam satu perkumpulan (*ijtima'*), mewujudkan kerja sama dan tolong-menolong. Kerja sama dan tolong-menolong itu dimaksudkan untuk menggapai manfaat dan mencegah apapun yang membahayakan mereka. Maka dapat dikatakan bahwa manusia adalah mahluk politik yang dibentuk oleh alam. Tetapi perkumpulan manusia itu perlu diatur dengan berbagai ketentuan yang dapat menjaga kesejahteraan mereka, baik yang berupa perintah maupun larangan. Mereka juga harus mematuhi pemimpin yang terpilih demi mencapai cita-cita bersama serta menjauhi segala perilaku yang menjadi sumber kejahatan.⁶

Pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut menempatkan manusia sebagai mahluk politik yang membentuk satu solidaritas (*ijtima'*) terlahir dari kecenderungan natural yang berada dalam dirinya yang mendorong manusia untuk bergabung dengan manusia yang lain dalam bentuk *ijtima'* untuk membangun kesejahteraan di dunia maupun akhirat. Konsep solidaritas ini juga dikembangkan oleh Ibnu Khaldun yang dikenal dengan teori *ashabiyah*.⁷ Dengan demikian dapat ditarik satu pemikiran bahwa terbentuknya satu negara/ peradaban yang besar bagi kedua pemikir tersebut dimulai dari satu solidaritas kecil (*ijtima'/ ashabiyah*).

Selain kecenderungan natural sebagaimana disebutkan di atas, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa terbentuknya satu kelompok (*ijtima'/ ashabiyah*) dipengaruhi oleh faktor primordial, sakral, tokoh, bhineka tunggal ika, konsep sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan.⁸ Dalam teorinya Ibnu Khaldun menggambarkan bahwa meskipun manusia telah membentuk organisasi kemasyarakatan, namun manusia masih memiliki watak saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu mereka membutuhkan seseorang yang

⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1995) hlm. 49

⁷ Secara etimologis *ashabiyah* berasal dari kata *ashaba* yang berarti mengikat. Secara fungsional *shabiyah* menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, *ashabiyah* juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok. Nurul Huda, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ashabiyah* (Suhuf, Vol. 20 No.1, Mei 2008), hlm. 44

⁸ Surbakti, *Memahami.*, hlm. 55

akan melaksanakan kewibawaan dan memelihara mereka dari permusuhan antar sesama mereka.⁹

Gambaran tersebut dapat dilihat dalam catatan *Muqaddimah* Ibnu Khaldun menyatakan bahwa :

“Manusia tidak mungkin dapat melangsungkan kehidupan dalam situasi anarki, tanpa kepala negara yang dapat menjaga kelangsungan hidup mereka. oleh karena itu, mereka memerlukan seorang pengendali. Orang itulah yang memerintah.”¹⁰

Orang yang melaksanakan pengendalian atau memerintah ini dapat dikatakan sebagai pemimpin (raja/presiden). Dalam menjalankan tugasnya, sang raja/presiden tersebut tidak dapat melaksanakannya secara mandiri (individu) apalagi jika negara atau organisasi tersebut bersifat besar. Oleh karena itu, Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya maka sang raja/presiden membutuhkan beberapa orang untuk membantu pelaksanaan kewibawaan tersebut. Para pembantu ini yang dikenal dengan pemerintahan.

Ibnu Khaldun menggambarkan hal tersebut sebagai berikut:

“Raja itu lemah, memikul beban terlalu berat. Dia harus meminta bantuan para pengikutnya. Dia membutuhkan bantuan mereka untuk kepentingan hidup dan seluruh mata pencahariannya. Maka betapa besarnya bantuan itu dia perlukan dalam melaksanakan kepemimpinan politik terhadap manusia bangsanya sendiri, terhadap makhluk Allah yang dipercayakan kepadanya sebagai warga negara. Bantuan diminta kepada orang-orang yang dekat dengan raja karena pertalian keturunan, pendidikan, atau kecintaan terhadap dinasti. Orang-orang tersebut dan raja bekerja dalam jiwa yang sama sehingga keserasian dalam meminta bantuan jadi sempurna”.¹¹

Dari gambaran di atas dapat dikatakan bahwa terbentuknya sebuah pemerintahan (negara) berawal dari diri individu-individu yang membentuk sebuah kelompok (*ijtima’/ ashabiyah*) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik secara internal (diri manusia) maupun secara eksternal, dan membutuhkan seseorang atau

⁹ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2010) hlm. 48

¹⁰ Ahmadie Thoha, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (terj) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000) hlm. 229

¹¹ Thoha, *Muqaddimah.*, hlm. 28

lebih untuk mengendalikan ketertiban/ mengatur dan menjalankan kepentingan kelompok demi mencapai satu tujuan yang sama.

Secara umum, dalam penyelenggaraan suatu negara terdapat beberapa bentuk pemerintahan diantaranya adalah *pertama*, sistem pemerintahan monarki atau kerajaan, yakni negara yang dipimpin oleh satu kepala negara. *Kedua*, sistem aristokrasi, yaitu negara yang dipimpin oleh beberapa orang, dan yang *ketiga* adalah sistem demokrasi. Aristoteles sebagai pemikir politik Yunani kuno berpendapat bahwa ketiga bentuk pemerintahan tersebut adalah model pemerintahan yang baik.¹²

2. Dinamika Sosial : *Lahirnya Pengaruh Antar Kebudayaan*

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa solidaritas sosial (*asshabiyah*) merupakan akar dari terbentuknya satu pemerintahan dan negara yang lahir dari proses interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia. Interaksi sosial oleh manusia tersebut karena manusia pada dasarnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Khaldun sebagai mahluk berpikir, mahluk politik, mahluk ekonomi, dan mahluk ber peradaban.

Konsep politik, ekonomi dan peradaban merupakan satu konsep yang terlahir dari manusia itu sendiri. Setiap sesuatu yang terlahir dari pikiran dan tindakan manusia kelak menjadi satu kebiasaan. Dari kebiasaan inilah terlahir satu kebudayaan.¹³ Kebudayaan sebagaimana halnya satu solidaritas, mengalami satu metamorfosis ke budaya yang lebih besar dan menyebar ketika terjadinya dinamika sosial.

¹² Ebyhara, *Pengantar.*, hlm. 108. Lihat juga pemikiran Montesquieu dan Jean Jaques Rosseau tentang bentuk-bentuk pemerintahan.

¹³ Kata “kebudayaan” berasal dari kata sanskerta *buddhayah* yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian, ke-budaya-an dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Dalam antropologi budaya, kata budaya hanya dipakai sebagai singkatan dari kebudayaan dengan arti yang sama. Lihat Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. VIII, 2000) hlm. 181. Bandingkan juga dengan pendapat Sidi Gazalba dalam Khazdiq, *Islam dan Budaya Lokal Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009) hlm. 28.

Penyebaran budaya dari satu daerah ke daerah lain ini terjadi tidak terlepas dari meyebarinya manusia dari satu daerah ke daerah yang lain. Terjadinya penyebaran manusia ini tidak serta merta terjadi begitu saja, namun terdapat berbagai macam yang melatari penyebaran tersebut. Proses penyebaran manusia baik secara individu maupun kelompok ini disertai dengan terjadinya penyebaran budaya yang disebut dengan difusi (*diffusion*).

Terjadinya difusi ini tidak terlepas dari proses terjadinya *akulturasi* dan *asimilasi* dari kebudayaan itu. Proses *akulturasi* adalah “proses sosial yang timbul bila satu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri”.¹⁴ Sedangkan proses asimilasi adalah perpaduan dua atau lebih dari kebudayaan, kemudian menjadi satu kebudayaan baru tanpa adanya unsur-unsur paksaan.¹⁵

Proses dinamika sosial yang melahirkan pengaruh antar budaya tidak terlepas dari kedua hal tersebut, yakni *akulturasi* dan *asimilasi*. Dari proses inilah kemudian terciptanya budaya pinjaman (*culture browing*) dalam istilah Powell, atau dalam pandangan Herskovit disebut dengan proses penularan budaya (*cultural transmission process*).¹⁶

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh Islam ke seluruh penjuru dunia ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial. Ketika Islam mengalami proses difusi dan akulturasi dengan budaya yang lain menimbulkan transmisi kultural dalam berbagai budaya, tanpa meninggalkan budaya aslinya.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar.*, hlm. 284

¹⁵ Khazdiq, *Islam.*, hlm. 89

¹⁶ Agus Sachari, Yan Yan Sunarya, *Desain Dunia Kesenirupaan Indonesia Dalam Wacana Transformasi Budaya* (Bandung : Penerbit ITB, 2001) hlm. 86

B. Pembahasan

Pembahasan dalam artikel penelitian menjelaskan hasil yang didapat dari penelitian. Penulis menyusun, menganalisis, mengevaluasi dan menginterpretasi serta membandingkan hasil temuan terbaru dengan temuan dari penelitian yang telah ada. Hindari pengulangan kalimat baik dari pendahuluan, metode maupun hasil. Jumlah paragraf pembahasan sebaiknya lebih panjang dari pendahuluan. Konsistensi artikel mulai dari judul hingga pembahasan harus diperhatikan. Kelemahan penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya dijabarkan pada bagian ini.

B. Pemerintahan Kesultanan Ternate : Satu Tinjauan Sosiologis

Dalam setiap pembicaraan mengenai berdirinya suatu bangsa, tidak terlepas dari geneologinya. Untuk itu, dalam penulisan makalah ini penulis memulai dengan tinjauan sosio politik tentang berdirinya kerajaan di Ternate. Secara umum dapat dideskripsikan perjalanan sejarah kesultanan Ternate ke dalam dua zaman, yakni zaman *Momole*, dan zaman *Sultan*.

1. Kerajaan Ternate : *Dari Zaman Momole ke Kolano*

Ketika berbicara tentang sejarah berdirinya kerajaan Ternate, terdapat berbagai versi sejarah yang menggambarkan hal ini. Versi tersebut bersumber dari sejarah lisan Ternate maupun beberapa catatan sejarah tertulis, yang ditulis oleh beberapa sejarawan Indonesia dan orang-orang portugis dan belanda yang pernah menduduki daerah Ternate.

Dalam catatan sejarah dinyatakan bahwa sebelum terbentuknya satu kerajaan di Ternate, pada zaman ini dikenal dengan zaman *momole*.¹⁷ Zaman ini jika didekatkan dengan teorinya Ibnu Khaldun, maka sangat mungkin disebutkan dengan *Asshabiyah* yang masih pada tingkatan marga.¹⁸ Pada zaman *momole* terdapat beberapa komunitas yang mendiami wilayah Ternate dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang dikenal dengan *momole*.

Ada beberapa perbedaan versi tentang penyebutan wilayah komunitas tersebut. Adnan Amal menulis bahwa wilayah tersebut adalah *Tobona*,

¹⁷ Istilah Momole berasal dari bahasa Ternate *Tomole* yang berarti *hebat* (lihat Fachri Ammari dan JW Siokona, Ternate, hlm. 51). Dari kata ini dapat ditafsirkan bahwa *momole* adalah orang yang memiliki kehebatan atau seorang pendekar.

¹⁸ Thoha, *Muqaddimah*., hlm. 156

Foramadiahi dan *Sampala*.¹⁹ Akan tetapi ada juga yang menyebutkan wilayah tersebut adalah, *Foramadiahi, Tabanga, Tubo dan Tobona*.²⁰ Dari wilayah-wilayah inilah kemudian didirikan sebuah kerajaan yang dikenal dengan kerajaan Ternate.

Terbentuknya lembaga kerajaan Ternate ini terlahir dari sebuah konsensus politik yang dibangun melalui satu musyawarah yang dilakukan oleh para *momole* (Tabona, *Foramadiyahi* dan *Sampala*) yang diprakarsai oleh *momole* Tobona. Terkait tempat berlangsungnya musyawarah ini tidak diketahui. Kemungkinan musyawarah tersebut dilaksanakan di Tabona, karena Tabona adalah wilayah tertua dan yang memprakarsai musyawarah tersebut, atau di *Foramadiyahi* karena letak wilayahnya berada di antara Tobona dan *Sampala* dan mungkin juga di wilayah *Sampala*, karena pada saat itu *momole* *Sampala* yang ditunjuk sebagai pemimpin utama.

Menurut Adnan Amal, musyawarah ini dilakukan dengan satu agenda tunggal, yakni mengangkat salah seorang dari para pemimpin wilayah tersebut untuk menjadi pimpinan umum dari mereka. Dari konsensus ini melahirkan *Cico* salah seorang *momole* dari wilayah *Sampala* sebagai pimpinan pertama atas ke tiga wilayah tersebut.²¹ Setelah diangkat menjadi pemimpin umum, maka *Cico* merubah gelarnya dari *Momole* menjadi *Kolano*.

Toety Heraty sebagaimana dikutip oleh Irmon Machmud menggambarkan peristiwa tersebut bahwa :

“Mereka mendirikan komunitas dipimpin seorang *momole*. *Momole* pertama Guna, mengawali masa pra *Kolano* dan mengadakan prakarsa musyawarah antara pengungsi politik tahun 1257, mempertemukan rakyat tiga komunitas. Setelah menerima wewenang sebagai pimpinan, *Momole* berubah status menjadi *Kolano* atau Raja yang kemudian namanya menjadi Masyhur yang agung dan lahirlah kerajaan Ternate diikuti kerajaan Tidore, dan Makean menjadi empat kerajaan termasuk Jailolo dengan *Kolano* masing-masing”.²²

¹⁹ M. Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010) hlm. 53-54.

²⁰ Fachri, Siokona, *Ternate.*, hlm. 52

²¹ Amal, *Kepulauan.*, hlm. 54

²² Irmon Machmud, *Kelompok Etnis Dalam Pelukan Elite Lokal, Studi Tentang Politik Etnis Dalam Pemilikada Kota Ternate 2010* (Tesis Program Pasca Sarjana UGM, 2011) hlm. 34. Dalam catatan yang lain Abdul Hamid Hasan menggambarkan bahwa pada tahun 1251 kelompok-kelompok suku bangsa di

Para kelompok ini mengadakan permufakatan yang dikenal dengan kata sepakatnya “*Foramadiyahi*” yang artinya *duduk yang sebenarnya*. Dari pengertian kata tersebut dapat kita memperluas pemaknaannya mejadi medudukkan kebenaran. Konsensus *Foramadiyahi* ini melahirkan satu sistem dan pembagian struktur pemerintahan kesultanan dalam menjalankan tugas ke pemerintahannya di wilayah Ternate, dengan menempatkan *Kolano* sebagai penguasa tertinggi.

Selain itu, ada juga dalam legenda rakyat Ternate menceritakan bahwa kerajaan Ternate adalah kerajaan yang rajanya berasal dari perkawinan antara Jafar Sadik salah seorang dari negeri Persia dengan seorang bidadari puteri dari raja kayangan yang bernama Nursafa. Perkawinan Jafar Sadik dan Nursafa ini dikaruniai tiga orang putera yang diberi nama Buka, Daradjat, dan Sahajat.²³ Namun satu ketika ibu dari ketiga anak tersebut kembali ke kayangan, dan kemudian Jafar Sadik menyusulnya dengan bantuan seekor burung Garuda dan bertemu dengan Nursafa di kayangan. Mereka sempat hidup di kerajaan kayangan dan dikaruniai seorang anak yang bernama Cico Bunga.

Pada usianya yang ke dua puluh tahun, Cico Bunga diperintahkan oleh kakeknya (raja kayangan) untuk turun dan memimpin rakyat negeri Gapi (sebutan untuk pulau Ternate) yang makmur dengan *gaumedi* (cengkih). Untuk mengatur negeri dan penduduknya, maka Cico Bunga membentuk organisasi kekuasaan untuk menjalankan tugas-tugas itu dengan melibatkan seluruh marga dari beberapa wilayah bersama-sama menyusun struktur kenegaraan.

C. Tata Pemerintahan Kesultanan Ternate Pra Islam

Secara umum dapat digambarkan bahwa Ternate sebelum datangnya Islam, belum memiliki kepercayaan dan agama yang jelas. Namun mereka diasumsikan

Ternate mengadakan permufakatan dengan kata sepakatnya *Foramadiyahi*. Abdul Hamid, *Aroma Sejarah Ternate* (kumpulan makalah tentang sejarah Ternate, 1998) hlm. 22.

²³ *Ibid.*, hlm. 131

memiliki kepercayaan animisme.²⁴ Di samping animisme, terdapat juga kepercayaan dinamisme. Pemujaan terhadap gunung Gama Lama²⁵ adalah satu ungkapan kepercayaan Dinamisme. Mereka percaya bahwa gunung adalah sumber kekuatan gaib (supranatural) yang dapat diminta pertolongannya untuk memberikan keselamatan hidup. Pemujaan terhadap kekuatan alam tersebut selain dengan sesajian dan do'a, juga dengan cara memberikan penghormatan. Penghormatan dilakukan dengan jalan mengelilingi gunung yang disebut "*kololi kie*" dan mendaki puncak gunung disebut "*fere kie*".²⁶

Sebelum datangnya Islam, pemerintahan kesultanan Ternate dipimpin oleh seorang raja yang disebut *kolano*. Kata *Kolano* sendiri berasal dari kata Koko-lanao, yang artinya tegak di atas kekuatan, dimana kekuatan-kekuatan di bawahnya terdiri dari lembaga-lembaga kerajaan, Dewan Menteri, Pemerintahan Wilayah dan Angkatan Bersenjata. Struktur pemerintahan kesultanan Ternate tersebut terdiri dari:

a. Lembaga Lembaga Kerajaan

- 1) Gam Raha : Empat kekuatan bangsa, sebagai dewan tertinggi yang memilih dan mengangkat kolano serta menyatakan perang dan damai.
- 2) Bobato²⁷ Nyagimoi se Tufkange : Dewan delapan belas²⁸, sebagai lembaga penetapan hukum-hukum adat dan berhak mengajukan kandidat kolano.
- 3) Sabua Raha : Empat Hakim Agung.
- 4) Fala Raha : Lembaga *Fala Raha* adalah lembaga penasehat *kolano*.

b. Lembaga Pemerintahan Kerajaan

²⁴ Moh. Ishom Yoesqi, *Penulisan Mushaf Al-Qur'an di Kedaton Kesultanan Ternate*, dalam *Mushaf-Mushaf Kuno di Indonesia* (ed), Fadhal AR. Bafadal dkk, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI, 2005) hlm. 265

²⁵ Gunung Gamalama adalah salah satu gunung berapi yang terdapat di Ternate.

²⁶ Depdikbud, *Sekitar Tradisi Ternate* (Ternate, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Depdikbud) hlm. 5-6

²⁷ Bobato secara harfiah mempunyai makna pelaksana peraturan. Secara umum digunakan untuk menunjuk kepala persekutuan, termasuk qadhi, imam, khatib dan moding.

²⁸ Bobato delapan belas terdiri dari wakil-wakil rakyat ke delapan belas marga atau "*Soa*", yang terdapat di Ternate. Mereka mewakili ke – 41 *soa* atau marga.

- 1) Pucuk pimpinan kerajaan dinamakan Kolano
- 2) Dewan menteri disebut “Soa-Sio” yang terdiri dari
 - a) Kimalaha Marsaoli sebagai Jogugu atau Perdana Menteri
 - b) Kimalaha Tomagola, memegang kekuasaan pertahanan keamanan
 - c) Kimalaha Tomaito, memegang kekuasaan perekonomian
 - d) Kimalaha Tamadi, memegang kekuasaan wilayah-wilayah
 - e) Kimalaha Payahe, memegang kekuasaan dalam negeri/ kerajaan
 - f) Fanyira Jiko, mengurus hukum adat dan agama
 - g) Fanyira Jawa, mengurus pendidikan dan agama
 - h) Fanyira Tabala mengurus hubungan dengan kerajaan lain
 - i) Fanyira Torongara, mengurus dalam negeri/ kerajaan
- 3) Sangaji-Sangaji, adalah pemerintah wilayah atau gubernur
- 4) Kolano-kolano Talok, adalah kerajaan-kerajaan di dalam kekuasaan Ternate
- 5) Sala Hakan, adalah gubernur penguasa penuh
- 6) Sosorus, adalah utusan kerajaan Ternate
- 7) Heku- Cim, adalah angkatan Laut dan darat kerajaan Ternate
- 8) Tul Lamo, adalah Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Kerajaan
- 9) Sadaha Kie, adalah keala bendahara Negara
- 10) Sowohi adalah Protokoler kerajaan
- 11) Sadaha Kadato, adalah Kepala Rumah Tangga Istana.²⁹

D. Akulturasi Islam dan Budaya Ternate Dalam Pemerintahan Kesultanan Ternate

a. Islamisasi di Ternate

Terjadinya penyebaran Islam ke Seluruh penjuru dunia merupakan satu hal yang tidak terlepas dari dinamika sosial yang terbangun dalam kehidupan manusia. Dari dinamika sosial tersebut sehingga terjadinya *difusi* kebudayaan dari satu daerah ke daerah yang lain. Terjadinya penyebaran unsur-unsur satu budaya itu dapat terjadi dengan adanya individu-individu yang membawakannya. Mereka itu adalah terutama para pedagang dan pelaut.³⁰

Terjadinya proses Islamisasi ini, terdapat beberapa teori yang menggambarkan tentang masuknya Islam ke satu daerah yakni; (1) Apabila seseorang atau beberapa orang asing yang menganut agama Islam yang bermukim di daerah yang didatangi;

²⁹ Hasan, *Aroma*., hlm. 28-29

³⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar*., hlm. 244

(2) Apabila terdapat beberapa orang dari penduduk pribumi telah menganut agama Islam; (3) Apabila sudah terdapat komunitas muslim dan secara sosiologis Islam telah melembaga ke dalam kehidupan masyarakat.³¹

Jika berangkat dari beberapa teori tersebut di atas, maka proses masuknya Islam ke Ternate dapat dilihat dari beberapa sumber yang menggambarkan hal tersebut. Sesuai tradisi lisan masyarakat Ternate, Islam sudah masuk di kepulauan Maluku (Ternate) sekitar abad ke-2 Hijriah (abad ke- 8 Masehi), yakni dibawakan oleh empat orang syekh dari Irak ke kepulauan Maluku. Keempat syekh tersebut adalah Syekh Mansur, Syekh Yakub, Syekh Amin dan Syekh Umar. Kedatangan para Syekh tersebut dikaitkan dengan terjadinya pergolakan politik di Irak, dimana terjadinya perburuan terhadap golongan Syiah oleh penguasa setempat, yakni Bani Umaiyyah maupun Bani Abasiyah. Ke empat syekh ini kemudian membagi daerah penyiaran Islam di sana, yakni Syekh Mansur di Ternate dan Halmahera Muka, Yakub di Tidore dan Makian, Amin dan Umar di Halmahera belakang, Maba, Patani dan Sekitarnya.³²

Ada juga beberapa catatan sejarah yang dikutip oleh Irja Arnyta Djafaar tentang masuknya Islam di Ternate. Naidah menuturkan bahwa masuknya Islam di Ternate dibawakan oleh Jafar Sadik pendatang dari Irak yang tiba di Ternate pada hari Senin 6 Muharam 643 H/ 1250 M. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa masuknya Islam di Ternate dibawa oleh para mubaligh yang berasal dari tanah Jawa. Kedatangan mereka ke Ternate selain berdagang, mereka juga menyiarkan agama. Menurut catatan Antonio Galvao, Islam masuk ke Ternate pada tahun 1460 dan berasal dari Malaka.³³

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa proses Islamisasi Ternate ini dibawakan oleh sekelompok orang maupun individu melalui perdagangan. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari posisi Ternate sebagai jalur perdagangan dunia. Karena

³¹ Yoesqi, *Penulisan.*, hlm. 266

³² Djoko Surjo, dkk, *Agama dan Perubahan Sosial Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia* (Laporan Penelitian; Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1992-1993) hlm. 78

³³ Irja Arnyta Djafaar, *Jejak Portugis di Maluku Utara* (Jogjakarta: Penerbit Ombak, Cet. II, 2007) hlm. 48

pada saat itu Maluku Utara (Ternate) dikenal sebagai daerah penghasil rempah yang menjadi satu komoditi primadona dunia.

Ketika hadirnya Islam dan telah menguat di kalangan masyarakat Ternate, Islam kemudian dilembagakan kedalam pemerintahan kerajaan Ternate. Meskipun pengaruh Islam telah menguat, tidak berarti budaya Ternate itu sendiri hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi terjadi satu akulturasi antara Islam dan budaya Ternate yang terpelihara sampai saat ini. Akulturasi ini juga berdampak ke dalam sistem pemerintahan kerajaan Ternate, sehingga terdapat kebijakan dan reformasi dalam sistem pemerintahan.

b. Pengaruh Islam dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kesultanan Ternate.

Menguatnya pengaruh Islam di Ternate tercermin dalam satu kebijakan kerajaan Ternate yang melembagakan Islam kedalam penyelenggaraan pemerintahannya. Satu hal mendasar dalam pemerintahan kesultanan Ternate yang terdapat pengaruh Islam adalah peralihan gelar dari *Kolano* menjadi Sultan, serta penambahan satu lembaga pemerintahan yaitu lembaga yang mengurus bidang keagamaan yang disebut dengan Bobato Akhirat.

Zaman kesultanan merupakan zaman di mana terjadinya peralihan gelar yang digunakan oleh raja Ternate dari *Kolano* menjadi Sultan. Peralihan nama dari *Kolano* ke *Sultan* ini dalam catatan sejarah terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin (1486-1500) yang menggantikan ayahnya Marhum. Pergantian nama ini dilatari dengan menguatnya pengaruh Islam dimasa kepemimpinan Zainal Abidin, akan tetapi tercatat bahwa dimasa kepemimpinan Marhum telah terjadi proses Islamisasi di Ternate yang intens, namun sebutan untuk raja masih tetap menggunakan gelar *Kolano*.³⁴

Zainal Abidin adalah salah satu sultan yang sejak masa kanak-kanak telah mendapat pendidikan Islam secara intens, dan sempat melakukan proses belajar di

³⁴ Amal, *Kepulauan.*, hlm. 62

Jawa yakni sekolah Tinggi Islam Gresik yang di pimpin Sunan Giri. Jadi dapat dikatakan bahwa penggunaan gelar Sultan oleh Zainal Abidin tidak terlepas dari pengaruh Sunan Giri, karena hal tersebut dilakukannya setelah kembali dari Giri.³⁵

Zainal Abidin tidak hanya melakukan perubahan nama dari *Kolano* ke Sultan, namun dia juga melakukan penambahan struktur dalam sistem pemerintahannya yang sangat dipengaruhi oleh nuansa ke-Islaman, yakni menambahkan lembaga yang mengurus keagamaan yang disebut sebagai *Bobato Akhirat*. Meskipun dalam penggunaan sebutan Sultan untuk raja menggantikan *Kolano*, namun nama *kolano* tidak ditinggalkan dalam praktek kerajaan.

Mudaffar Syah, Sultan Ternate ke 49 menggambarkan sistem pemerintahan kesultanan Ternate ini terdiri dari : Dewan Delapan Belas, Sultan, Penasehat yang terdiri dari kepala-kepala adat wilayah masing-masing, Pemerintah yang terdiri dari; *jogugu*, sebagai Perdana Menteri, *Jo Hukum Soa-Sio*, Mahkamah Agung, *Jo Hukum Sangaji*, Jaksa Agung, *Kapita Lao* Panglima Angkatan Bersenjata, *Tuli Lamo*, Sekretaris Negara. Selain itu, terdapat juga dua lembaga yang mengurus urusan dunia *Bobato Dunia*, yang terdiri dari *Sangaji*; kepala pemerintahan wilayah, *mohimo*; kepala kampung yang dituakan, *kapita*; militer, *fanyira*, kepala desa, *Marinyo*; Penghubung. Sedangkan *Bobato Akhirat* adalah lembaga yang mengurus persoalan keagamaan yang terdiri dari para imam dan stafnya.³⁶

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa satu negara yang baik oleh Ibnu Khaldun adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan agama. Ibnu Khaldun Juga menyatakan bahwa kerajaan yang luas dan memiliki kedaulatan yang kuat didasarkan kepada agama, baik dari kenabian maupun seruan akan kebenaran.³⁷ Hal inilah yang diterapkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan di kesultanan Ternate yang dikenal dengan dua falsafah dasar, yakni falsafah “ *Adat Matoto*

³⁵ Machmud, *Kelompok*, hlm. 37

³⁶ Mudaffar Syah, *Eksistensi Kesultanan Ternate Dalam Sistem Tata Negara Republik Indonesia (Potensi keraton Dalam Pembangunan Kebudayaan Bangsa Yang Berbhineka Tunggal Ika)*. Makalah, 2009. hlm. 5

³⁷ Thoha, *Muqaddimah*, hlm. 192

Agama, Agama Matoto Kitabullah, Kitabullah Matoto Allah Ta'ala" dan falsafah "*Jou Se Ngofa Ngare*".

Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan beserta para pembantu dan masyarakatnya berpegang dalam satu hukum dasar yang telah dihimpun secara bersama menurut kesatuan suku bangsa yang ada, dan menjadi falsafah kenegaraan kerajaan Ternate yang dikenal dengan enam sila dasar yaitu:

1. *Adat se Atorang*; merupakan hukum dasar yang dipatuhi dan disusun menurut kebiasaan yang dapat diterima oleh semua warga.
2. *Istiadat se Kabasarang*; lembaga adat dan kekuasaannya menurut ketentuan
3. *Galib se Lukidi*; kebiasaan lama yang menjadi pegangan suku bangsa diatur menurut sendi ketentuan.
4. *Ngale se Duhu*; bentuk budaya masing-masing suku bangsa dapat digunakan secara bersama sesuai dengan keinginan.
5. *Sere se Diniru*; tata kehidupan seni budaya dan kebiasaan yang timbul dalam masyarakat yang diterima secara bersama.
6. *Cing se Cingare*; pasangan wanita pria merupakan kesatuan yang utuh dengan hak dan kewajiban masing-masing perlu dibina dan dijaga kelestariannya.³⁸

Ke enam sila tersebut di atas, bersandar pada satu landasan pokok yaitu Agama. Agama sebagai landasan dari adat tersebut dapat dilihat dalam falsafah Ternate yang berbunyi "*Adat Matoto Agama, Agama Matoto Kitabullah, Kitabullah Matoto Allah Ta'ala*" adat berlandaskan pada agama dan landasan agama adalah kitab Allah, yakni Al-Qura'an dan Hadits Rasul yang keduanya bersumber dari Allah SWT.

Implikasi falsafah tersebut dalam tata pemerintahan kesultanan dan kehidupan sosial masyarakat Ternate terlihat jelas dalam beberapa keputusan atau peraturan kesultanan yang dikeluarkan sejak kepemimpinan sultan Bayanullah yakni, pembatasan poligami, larangan kumpul kebo, biaya dan pengset perkawinan yang berlebihan dipangkas, dan perempuan wajib berpakaian secara pantas. Sedangkan

³⁸ Rinto Taib, *Gerakan Sosial Masyarakat Adat Kesultanan Ternate, Upaya Memahami Konflik Pembangunan Bandara Babullah Ternate*, (Ternate; Dewan Pakar Kesultanan Ternate dan Tim 4 Aliansi Masyarakat Peduli Korban Pembangunan Bandara Sultan Babullah Ternate, 2010) hlm. 45

peraturan yang mengikat pada pengangkatan pejabat kesultanan (*bobato*) baik di pusat maupun di daerah adalah seseorang harus beragama Islam.³⁹

Sedangkan falsafah "*Jou Se Ngofa Ngare*" mempunyai makna kesaksian antara seorang hamba dengan Tuhannya yang lebih bersifat teologis. Secara ontologis (ilmu tentang ada sepanjang itu ada) maka "*Jou Se Ngofa Ngare*" merupakan "*al-awwal*" dalam arti sebagai asal dari segala sesuatu. Jika sesuatu itu diadakan oleh "*al-awwal*" maka tidak bisa tidak, seluruh alam pasti berasal dari "*al-awwal*" yaitu "*Jou Se Ngofa Ngare*" yang dimaknai *Jou* sebagai Allah sang pencipta *Se* bermakna dan, sedangkan *Ngofa Ngare* sebagai makhluk yang diciptakan. Kemudian Islam masuk ke Ternate dan mengajarkan azas Islam ialah dua kalimat syahadat.⁴⁰

Dalam perkembangannya falsafah ini mengalami proses materialisasi dalam kehidupan sehingga menjadi budaya yang pemaknaannya tidak hanya terbatas kepada hubungan Tuhan dengan hambanya, tetapi pemikiran ini dijewantahkan dalam konsep ketatanegaraan kesultanan di Moloku Kie Raha yang disimbolkan dalam hubungan antara engkau sebagai pemimpin/penguasa, dan aku sebagai rakyat.

Satu hal yang menarik dalam sistem pemerintahan kesultanan Ternate adalah ada pendistribusian wewenang dalam tata pemerintahannya sebagaimana yang dikembangkan oleh John Lock dan Baron Montesqueiu dengan teori Trias Politica, yakni kekuasaan legislatif (*rule making function*) membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif (*rule making function*) melaksanakan undang-undang dan kekuasaan Yudikatif (*rule adjudication function*) mengadili atas pelanggaran undang-undang.⁴¹

Kekuasaan legislatif dalam pemerintahan kesultanan Ternate disandarkan kepada *Gam Raha* dan *Bobato Nyagimoi Se Tufkange* (Dewan Delapan Belas) yang bertugas sebagai penentu arah pembangunan, mengangkat dan memecat sultan

³⁹ Amal, *Kepulauan.*, hlm. 67

⁴⁰ Syah, *Eksistensi.*, hlm. 3

⁴¹ Ebyhara, *Pengantar.*, hlm. 188

(*kolano*) serta mengawasi sistem yang dijalankan oleh Kolano. Sedangkan kekuasaan eksekutif disandarkan kepada kolano sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan keputusan Dewan Delapan Belas serta memiliki dua macam hak prerogatif yaitu, *Idhin*⁴² *Kolano* dan *Jaib Kolano*.⁴³ Sabua Raha sebagai Empat Hakim Agung dan Hakim Agama adalah lembaga yudikatif.

Dari uraian ini, maka sistem pemerintahan kesultanan Ternate ini dapat dikategorisasikan atau lebih dekat dengan sistem monarki terbatas, karena sultan memiliki kekuatan yang dibatasi oleh konstitusi yang tertulis atau dengan prinsip fundamental yang tak tertulis.

E. Kesultanan Ternate: Kerajaan yang Demokratis Religius

Penulis membatasi Konteks demokrasi dalam sub pokok bahasan ini adalah dalam proses pengangkatan kesultanan. Dalam tata pemerintahan kesultanan Ternate sejak didirikan sampai sekarang terdapat 48 Sultan. 17 di antaranya memimpin pada masa *Kolano* dan 31 yang memimpin di era kesultanan. Tata pemerintahan Kesultnan Ternate ini jika ditelusuri akar pembentukannya, maka dapat dikategorikan sebagai kerajaan yang demokratis (*democracy monarchy*). Satu hal yang membedakannya dengan sistem yang terdapat di kerajaan lain adalah tidak ada pemberlakuan putera mahkota dalam pewarisan tahta kesultanan.

Dalam tradisi pemerintahan kesultanan Ternate, Sultan diangkat oleh *Bobato Delapan Belas* (legislatif) dan disahkan oleh *Gam Raha*. Pengangkatan Sultan oleh dewan delapan belas ini merupakan representasi dari suara seluruh marga yang berada di Ternate. Pengusulan kesultanan ini selain melalui tahapan proses secara kenegaraan, juga dilakukan proses supranatural. Dan jika prosesi pengangkatan sultan tersebut terdapat indikasi yang tidak wajar, maka akan berdampak pada pemerintahan yang akan dipimpinya. Prosesi ini dikenal dengan adat mengurung diri. Prosesi ini bermakna untuk mensucikan kepribadian lahir batin. Hal ini telah

⁴² Idhin dan Jaib Kolano adalah instruksi, titah ataupun fatwa sultan yang harus di taati oleh rakyat.

⁴³ Syah, *Eksistensi*, hlm. 5-6

berlaku sejak zaman *momole*, dan ketika pengaruh Islam mulai menguat, maka tradisi ini diganti dengan cara berpuasa selama tujuh hari.⁴⁴

Satu hal yang tak kalah menarik juga dalam Sistem pemerintahan kesultanan adalah kepemimpinan yang pernah dijabat oleh seorang perempuan. Hal ini terlihat dalam catatan sejarah pemerintahan kesultanan Ternate juga pernah dipimpin oleh salah seorang perempuan yang bernama Nyai Cili Boki Raja yang memimpin pada tahun 1522-1529. Selain itu, pernah terjadi pemberhentian sultan (*impachmen*) oleh dewan delapan belas pada masa kesultanan Tabariji 1532-1535 karena telah beralih keyakinan ke agama kristen sehingga dewan delapan belas mengangkat Khairun sebagai pengganti Tabariji. Catatan sejarah ini menggambarkan perkembangan nilai demokrasi dalam kesultanan Ternate.

C. Simpulan

Berangkat dari pembahasan di atas, maka penulis menarik beberapa catatan penting sebagai kesimpulan penulisan ini yakni:

1. Kesultnan Ternate adalah sebuah negara yang terlahir dari solidaritas rakyat yang dalam teori Ibnu Khaldun disebut dengan *Ashabiyah*. *Ashabiyah* di kalangan rakyat Ternate ini telah terbentuk jauh sebelum masa kesultanan yang dikenal dengan *momole*. Dari solidaritas tersebut kemudian berevolusi menjadi sebuah negara yang dilakukan dengan satu konsensus politik yang dikenal dengan konsensus *foramadiahi* yang kemudian melahirkan sebuah kerajaan Ternate.
2. Ketika masuknya ajaran Islam ke Ternate dan mengalami akulturasi dengan kebudayaan Ternate, maka terjadi reformasi sistem pemerintahan yakni, perubahan gelar raja dari *Kolano* menjadi *Sultan* dan terdapat penambahan lembaga yang mengurus bidang keagamaan yang disebut dengan *Bobato Akhirat*. Selain itu, ada juga beberapa kebijakan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang bersumber dari ajaran Islam.
3. Sistem Kesultanan Ternate adalah sistem kerajaan demokratis religius yang dipimpin oleh seorang sultan. Aktualisasi demokrasi ini dapat dilihat dalam

⁴⁴ Depdikbud, *Sekitar.*, hlm.96

pengangkatan seorang sultan dan pembagian wilayah kekuasaan dalam praktek pemerintahannya dengan beberapa lembaga sebagai legislatif (*bobato* delapan belas) dan eksekutif (pemerintah).

4. Dengan suatu solidaritas sosial *Ashabiyah* yang kuat dan negara yang didasarkan pada agama, sistem pemerintahan Kesultanan Ternate ini jika disandarkan dengan teori kenegaraannya Ibnu Khaldun, maka dapat dikategorikan sebagai negara yang baik, karena dapat membangun kebaikan penduduknya di dunia dan di akhirat.

Referensi

Referensi ditulis dengan format APA Edisi ke 6. Untuk contoh penulisan bisa dilakukan seperti ini (Adam & Basir, 2019, hal. 22). Disarankan untuk menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero.

Untuk Daftar Pustaka adalah seperti ini:

- Adam, Adiyana. (2019). *Gender dalam Perspektif Islam*. Ternate: Penerbit Perspektif.
- Adam, Adiyana. (2019). Kesetaraan Gender dalam Islam. *Al-wardah : Jurnal kajian Perempuan, Gender dan agama*, 8 (1). <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/6>
- Amal, M. Adnan , *Kepulauan Rempah-Rempah Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Ammari, Fachri, J.W, Siokona. *Ternate Kelahiran dan Sejarah Sebuah Kota*, Pemerintah Kota Ternate, 2003.
- Bafadal, Fadhal AR. dkk, (ed). *Mushaf-Mushaf Kuno di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI, 2005.
- Djafaar, Irja Arnyta. *Jejak Portugis di Maluku Utara*, Jogjakarta: Penerbit Ombak, Cet. II, 2007
- Ebyhara, Abu Bakar, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2010.
- Iqbal, Muhammad, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam, Tela'ah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Khazdiq, *Islam dan Budaya Lokal Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. VIII, 2000.

- Sachari, Agus. Sunarya, Yan Yan. *Desain Dunia Kesenirupaan Indonesia Dalam Wacana Transformasi Budaya*, Bandung : Penerbit ITB, 2001.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit PT Grafindo, 2010.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Cet. III, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Taib, Rinto, *Gerakan Sosial Masyarakat Adat Kesultanan Ternate, Upaya Memahami Konflik Pembangunan Bandara Babullah Ternate*, Ternate; Dewan Pakar Kesultanan Ternate dan Tim 4 Aliansi Masyarakat Peduli Korban Pembangunan Bandara Sultan Babullah Ternate, 2010.
- Toha, Ahmadi, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (terj), Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Jurnal dan Makalah

- Nurul Huda, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ashabiyah*, Suhuf, Vol. 20 No.1, Mei 2008.
- Depdikbud, *Sekitar Tradisi Ternate*, Ternate: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Depdikbud Ternate.
- Hamid, Abdul, *Aroma Sejarah Ternate*, kumpulan makalah tentang sejarah Ternate, 1998.
- Machmud, Irmon, *Kelompok Etnis Dalam Pelukan Elite Lokal, Studi Tentang Politik Etnis Dalam Pemilukada Kota Ternate 2010* (Tesis Program Pasca Sarjana UGM, 2011)
- Laporan Penelitian Tim Peneliti UGM, *Agama dan Perubahan Sosial, Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat, dan Struktur Sosial-Politik Indonesia*. Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM Yogyakarta, 1992-1993.
- Syah, Mudaffar. *Eksistensi Kesultanan Ternate Dalam Sistem Tata Negara Republik Indonesia (Potensi keraton Dalam Pembangunan Kebudayaan Bangsa Yang Berbhineka Tunggal Ika)*. Makalah, 2009.
- (<http://tasarkarsum.blogspot.com/2007/09/>) akses tanggal 23 mei 2011 jam 21.17